

TANGGUNG GUGAT PNBIT DLM PENDAFTARANKARY HK CP THDAP FIRST TO ANNOUNCE

Dewi Mulyani

1311401590

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomer 45, Surabaya 6018, Indonesia

083856126527,dewiania03@gmail.com

ABSTRAK

Plt ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hkm thdap pgg layanan Penegakan hkm Hk cp atau percetakan diatur didlm Udg-udg Nmor 28 Thn 2014 ttg Hk cp, mengingat pkmb pldng hkm thdap Hk cp bagi pnpta masih kurang, dmna masih banyak terjadinya plgg yaitu pengambilan kary cpt orang lain tampak sepengetahuan sang pemlik.

Persalah plt ini adh tanggung gugat pnbit thdap pndftrkary hk cp dn bagaimana penegakan hkm thdap plgg Hk cp yg ditimbulkan apabila seseorang mlkkan plgg pembuatan bku thdap kary orang lain tampak sepengetahuan pemlik.

Plt ini mggnkan metode plt hkm normatif , Dlm plt hkm normatif, hkm yg tertulis dikaji dair berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dn kekuatan mengikat suatu udg-udg. Plt ini jga mggnkan pendekatan udg-udg dn mggnkan jns dn sumber bhn hkm premier, bhn hokum sekunder, dn bhn nonhkm. Serta mggnkan teknik pengumpulan bhn hkm dgn studi kpustakaan.

Hasil plt ini menunjukkan bwa, pengaturan hkm thdap pgg layanan pndftrkary cpt "bku" Udg-udg Nmor 28 Thn 2014 ttg hk cp dn Udg-udg Nmor 3 Thn 2017 Ttg perbkuan.

Kata kunci : hk cpt, bku dn pecetakan, tanggung gugat

ABSTRAK

This study aims to determine the legal arrangements on the use of services Copyright law enforcement or printing is regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright, considering the development of legal protection of Copyright for the creator is still lacking, where there are still many occurrences of violation of the taking of copyrighted work others seemed to the owner's knowledge.

The problem of this study is the publisher's accountability of the registration of the copyrighted work and how law enforcement of copyright infringement caused if a person commits a violation of the book's creation of another's work appears to the owner's knowledge.

This research uses normative legal research method. In normative law research, written law is studied from various aspects of theory, philosophy, comparison, structure, consistency, explanation, formalities and strength binding a law. The study also uses a statutory approach and uses the types and sources of premier legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. As well as using techniques of collecting legal materials with literature study.

The results of this study indicate that, the legal arrangement on the use of registration service copyrighted work "book" Law Number 28 Year 2014 about copyright and Law No. 3 of 2017 About the bookkeeping.

Keywords: copyright, books and printing, accountability

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ngra Indonesia dlm kemerdekaan di kumandngkan di seluruh dunia, ketata ngraan terputus hbng seluruh tata tertib hkm Hindia Belanda. Lahirnya Ngra Indonesia yg bebas dair penjajahan. Tata tertib hkm di landasi oleh pancasila dn Udg-udg 1945 (UUD). Maka pembentukan Udg-udg Dasar 1945 menetapkan dlm kttannya beberapa pertran peralihan , di bidng ilmu pengetahuan , seni, sastra yg mempunyai peranan strategi dlm memdukung pembentukan bangsa dn kesejahteraan umum segabai amanat kan Udg-udg Dasar Ngra Republik Indonesia Thn 1945.

Pd Udg-udg Dasar 1945 adh Psal yg terpenting. Bwa Psal tersebut menyebutkan," sebagai badn Ngra dn pertran yg masi berlaku da nada yg baru menurut Udg-udg Dasar " pertrang yg ada dlm Kitap Udg-udg Hkm Predata, KUHD, KUHP,AB,IS dn bagian pertran lainnya yg dlm bentuk parsial yg berasal seblm masa prokelamasi masi ttap di berlakukan.¹

Demikian dlm unsur-unsur pemerintahan dlm rangka pembangunan di bidng hkm sebagai mana diisyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Ngra (GBHN) TAB No.II/MPR/1983, TAP MPR II/MPR/1988, dn TAP MPR II/MPR/1933 yg diupayakan untk penyusunan kondifikasi hkm nasional yg di dasarkan kepdna landasan sumber hkm yg terkait dlm pancasila dn Udg-udg Dasar 1945.

Tanggung gugat merupakan kwjb untk menggugat sebagai akibat mlkkan plgg norma. Bebeapa akibat yg menimbulkan plgg norma tersebut dpt terjadi krna di sebabkan krna.

1. Unsur perbutan melawan hkm;
2. Wansprestasi.

Maka tanggung gugat / *liability* di atas memiliki makna sebagai bandingan engan tanggung jawab / *responsibility*, krna tanggung gugat / *liability* hanya digunakan sebagai rumusan hkm privat atau perdata.

Pengenalan HKI (Hk kky itt) sebagai mana hk mlik perorangan yg tdk berwujud dn penjabarannya scra langsung dlm tatana huum positif terutama dlm kehidupan eknm merupakan hal baru di Indonesia. Dalm sudut pandng HKI , aturan tersebut di butuan krna sifat penghargaan,penghormatan dn pelindungan tdk saja membrkan rasa aman.

Jika di lihat dair latar belakang historis HKI terlihat bwa di Ngra barat (*wastern*) penghargaan atau kekayaan intelektual atau hasil olah individu suda sangat lama di terapkan dlm budaya mereka yg I terjemakana dlm Udg-udg.

Hk kky itt adh hk-hk untk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yg diatur oleh norma-norma atau hkm yg berlaku. Hk kky itt merupakan hasil pemikiran manusia yg diimplementasikan berupa cptan berbentuk kary, seni, desain, maupun

¹ Saidin,S.H., Aspek hkm kekayaan intelektual,h .1.

penemuan yg dpt dimanfaatkan dlm kehidupan manusia. Hasil pikir itu kmd dirumuskan sebagai intelektulitas.²

Hk cp merupakan salah satu bagian dair kekayaan intelektual yg memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, krna mencakup ilmu pengetahuan, seni dn sastra (*art and literary*) yg di dlmnya mencakup pula program computer. Hk cpt sebagai salah satu bagian dair pd hkm positif, merupakan landasan dair Hk kky itt atau *Intellectual Property Right*.

Hk mlk itelektual adh terjemahan dair *Intellectual Property Right* yg pnlsan terjemaan kurang tepat, oleh krna itu pengertian hk mlk sudah bukan triminologi hkm perdata. Lebih tepat di sebut dgn istilah hk kky itt. Hk ini adh hk khusus dair pnpta dlm pembkuan disebut pgrang. Plgg atas kary cpt dlm pnbitan semakin merakyat mengakibatkan pembkuan tdk laig mendptkan perlakuan yg layak maka dair itu produk bajakan yg di edarkan scra erbuka dn terang-terangan tanpa merasa mlkkan plgg hkm, dmna dlm kitab udg-udg hk cpnya telh diberlakukan. Dlm Udg-udg Republik Indonesia Nmor 28 Thn 2014 ttg Hk cp, maka sudah sewajarnya bwa masyarakat kita mengetahui ttg Hk kary orang lain. Maka seharusnya hk ini harus di hargai dn hormati scra moral dn di berikan imbalan yg layak scr eknm.

Persalh Hk cp selain menygkut kptg pemegang hk cp itu sendiri, maka scra tdk langsung mempengaruhi para pnbit dn percetakan, krna para pnbitlah yg scra langsung terlibat dlm melestarikan cptan para pgrang. Dgn adnya bku yg beredar scra tdk sah yg dilakukan oleh pihk-pihk tertentu mempengaruhi para pgrang dn percetakan yg dirugikan sebagai persaingan dagang yg tdk sehat. Hal ini dpt menimbulkan kemacetan bagi pnbit dn percetakan krna bku-bku yg diedarkan itu tanpa izin pnls maupun pnbit dn kmd di jual belikan kepd umum. Selain kerugian materiil yg scra nyata dialami oleh pnbit dn percetakan serta pnls, jga terdpt kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kmmuan pnls untk mencptkan kary-kary yg bermutu tinggi.

Perbedaan antara *first to file*, *fisrt to invent* dn *first to announce* adh system pembentukan paten yg mengatur mengenai, *first to file* mengatur mengenai bwa seorang yg pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemengang paten, masa berlaku hk ptn adh 20 thn terhitung sejak tanggal pnrmaan permintaan paten Psal. Khusus untk paten sederhana diberikan jangka waktu sampai 10 thn sejak tanggal di berikan surat paten sederhana. sdk *fisrt to invent* mengatur ttg mekanisme bwa seorang yg pertama kali menemukan dianggap sebagai pemegang paten. (diatur dlm beberapa Ngra maju seperti Amerika). Sdk *first to announce* mengatur ttg mekanisme untk mngummkan pertama kali hasil kary sendiri dn scra otomatis sebagai pemlik cptannya. Jangka waktu pldng hk cp scra umumnya adh sepanjang hidup pnptanya ditambah 50 thn atau 50 thn setelh pertamakali di umumkan atau di pubksi atau dibuat, kecuali 20 thn setelh pertama kali di siarkan untk kary siaran.

Pldng Cptan Bku yg tdk diketahui pnptanya menurut UUHC 2014 disebutkan bwa dlm cptan tdk diketahui pnptanya dn cptan tersebut blm dilakukan pngumman, hk cp atas cptan tersebut dipegang oleh Ngra untk kptg pnpta. Pd ayat (2) dinyatakan bwa dlm cptan

² Adrian Sutedi, 2009, Hk kky itt, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 38.

telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penerimanya, atau hanya tertulis dalam aliasnya atau samaran penerimanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang mungkin pengumuman untuk kopian penerimanya.

Hanya perusahaan dan penerimanya yang telah menyetujui adanya kerjasama. Terjadinya hubungan kerjasama hak cipta ada masa berlakunya. Perusahaan mempunyai hak atas karya yang ditulis, beberapa hal perusahaan dan hak cipta ada dua hal yang berbeda. Hak cipta sendiri masih ada pada tangan sang perusahaan. Sedangkan hak penerima ada pada penerima buku. Hak cipta sendiri sepenuhnya ada di dalam tangan perusahaan seumur hidup sampai perusahaan wafat dan hak penerima hanya berlaku sesaat.

Hak penerima hanya berlaku berasal kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak "perusahaan dan perbit" sedangkan batas hak penerima sampai batas kontrak kerja yang sudah ditentukan oleh beberapa hal sebagai kontrak perjanjian buku diterbitkan selama 3 tahun, atau buku akan dicetak sekian eksemplar. Ketika kontrak kerja yang sudah mencapai batas tersebut, maka kerja itu habis, hak bebas kembali pada sang perusahaan.

Beberapa hal yang terjadi dalam kalangan masyarakat kita adalah kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak cipta seperti halnya A adalah seorang perusahaan buku dan dia berniat berkerja sama atas pencetakan karya tulisnya kepada B. B tidak menyadari atas karya tulis A yang telah diambil oleh C dan di daftarkan oleh C ke Direktorat Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa hari kemudian A menyadari ketika membaca beberapa buku yang baru terbit dan beredar, bahwa buku yang dibacanya adalah karya tulisnya. Pada akhirnya A melaporkan B atas kelalaiannya tersebut ke Direktorat Kekayaan Intelektual, dan A juga mengajukan gugatan ke C atas tuduhan mengambil karya tulisnya tanpa sepengetahuan dan izin untuk menerbitkan dan mendistribusikan karyanya.

Dalam hal ini dijelaskan tentang pemegang hak cipta dapat diidentifikasi dengan kata-kata sah, Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hukum Atas Kekayaan Intelektual) .Dalam buku ke III B.W "Perihal Perikatan". Perikatan (*verbintenis*) arti yang lebih luas dari kerja yang, sebab dalam buku III diatur sebagai perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau kerja yang, perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmaige daad*) dan perihal yang dari pengurusan kopian orang lain tidak berasal dari persetujuan (*zaakwaarneming*). Dalam sebagian buku ke III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau kerja.³ Dalam kerja GATT (*General Agreement On Tariffs and Trade*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerja pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*).⁴

Perusahaan dan percetakan yang telah diberi kepercayaan dari seorang perusahaan untuk memproduksi mengedarkan serta menjual belikan kepada masyarakat umum, sudah diwujudkan untuk turut serta membantu melindungi hak cipta pengaruh buku sehingga hak pengaruh buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi. Peranan perusahaan dan percetakan akan lebih nyata lagi apabila dari pengaruh buku diperhatikan sepenuhnya oleh pihak penerima dan percetakan. Dengan demikian timbul saling percaya yang harmonis antara para perusahaan dan percetakan buku untuk saling bekerja sama dengan yang lain.

³ Prof. Subekti, S.H. pokok-pokok hukum perdata, perbit PT. Intermasa, h. 122.

⁴ Hanns Ulrich, GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, ICC Studies Volume 11, Max planck Institute, Munich, 1998, h. 129.

Pjy Pnbitan Bku telh menyepakati suatu pjy antara pgrang dn pnbit bku adh proses pertama dlm suatu pnbitan bku, pjy pnbitan bku tdk boleh bertgan dgn Psal 1320 KUHPerdata, yakni adnya ksp antara pgrang dgn pnbit adnya keckap hkm dair pgrang ataupun pnbit, adnya objek tertentu, dn klausula yg halal ataupun suatu sebab yg tdk terlarang. Isi suatu pjy pnbitan bku harus jelas mengatur ttg pengalihan hk eknm suatu cptan yg dilindungi hk cp dair pgrang kepd pnbit bku yg akan mengeksplorasinya. Upaya pengalihan dgn tujuan mengeksplorasi cptan kary tulis harus diatur scra jelas dn transparan dlm isi pjy pnbitan bku yg bersangkutan .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bdsk latar belakang masalah yg sebagaimana telh diuraikan diatas, maka scra lebih konkret, masalah plt yg dpt di rumuskan adh sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pnbit dlm pnbitan kary hk cp?
2. Bagaimanakah tangung gugat pnbit dlm pndftrkary hk cp thdap *First to announce* ?

1.3 METODE PLT

A. Tipe Pendekatan

Plt ini mggnkan hkm normatif, metode pendekatan yg di gunakan dlm plt ini mggnkan pendekatan perudg-udgan (*StatuteApproach*), dn Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁵

a. Pendekatan Perudg-udgan (*StatuteApproach*)

“Metode pendekatan yg dilakukan dgn semua udg-udg dn regulasi yg bersangkutan dgn isu hkm yg sedng terjadi dn peneliti jga harus memahami hierarki dn ass-ass Perudg-udgan.” Dlm plt ini mggnkan pendekatan Udg-udg Nomer 28 Thn 2014 Ttg Hk cp, Udg-udg Nomer 3 Thn 2017 Ttg Sistem Pembkuan.

Kitab Undng-Undng Hkm Perdata yg dihadapi untk kmd membangun argumentasi hkm dlm memecahkan isu yg akan dihadapi.⁶

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dgn memahami latar belakang apa yg dipelajari dn pkmb pengaturan mengenai isu hkm yg dihadapi. Demikian diperlukan peneliti untk mengungkap filosofi dn pola pikir yg melahirkan sesuatu yg sedng dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap pengungkapan

⁵ Peter Mahmud Marzuki

⁶ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h .94.

filosofis dn pola pikir ketika sesuatu yg dipelajari itu dilahirkan, dn memang mempunyai relevansi dgn masa sekarang.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dgn membandingkan udg-udg suatu Ngra dn udg-udg dair satu atau lebih ngra lain mengenai hal yg sama. Selain itu, dpt diperbandingkan di samping udg-udg yaitu putusan pengadilan beberapa ngra untk kasus yg sama.

Kegunaan pendekatan ini adh memperoleh persamaan dn perbedaan di antara udg-udg tersebut. Untk menjawab mengenai isu hkm antara kttan udg-udg dgn filosofi yg melahirkan udg-udg itu. Dgn demikian perbandingan tersebut akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dn udg-udg di beberapa ngra. Hal ini jga dilakukan dgn memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu ngra dgn ngra lain untk kasus serupa atau sama.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dair pandangan-pandangan dn dkrin-dkrin yg berkembang di dlm ilmu hkm. dgn mempelajari pandng-pandangan dn dkrin-dkrin dlm ilmu hkm, peneliti akan menemukan ide-ide yg melahirkan pengertian-pengertian hkm, konsep-konsep hkm, dn ass-ass hkm relevan dgn isu yg dihadapi. Pmhman akan pandangan-pandangan dn dkrin-dkrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dlm membangun suatu argumentasi hkm dlm memecahkan isu yg dihadapi.

B. Pendekatan Udg-udg

Pendekatan yg dilakukan dgn menelaah semua Udg-udg dn regulasi yg bersangkutpaut dgn isu hkm yg akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untk mempelajari dn melihat adakah konsistensi dn kesesuaian antara satu udg-udg dgn Udg-udg lainnya atau antara suatu udg-udg dn Udg-udg Dasar atau antara regulasi dn udg-udg.

C. Sumber-sumber Dlm Plt hkm

1. Bhn hkm primer, yaitu kttan-kttan dlm pertran perudg-udgan yg mempunyai kekuatan hkm mengikat, baik pertran yg dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pertran yg diterbitkan oleh ngra lain dn bhn-bhn internasional. Bhn hkm primer yg dibawah otoritas udg-udg adh Pertran Pemerintah, Pertran Presiden atau pertran suatu Badn atau Lembaga Ngra sebagai mana disebutkan dlm Psal 7 Ayat (4) Udg-udg Nmor 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Pertran Perudg-udgan. Sdk untk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yg lebih rendah dibandingkan Pertran daerah. Bhn hkm primer, yaitu bhn hkm yg bersifat mengikat, berupa:

- a) Udg-udg Dasar 1945
- b) Udg-udg Nmor 28 Thn 2014 ttg Hk cp.

- c) Udg-udg Nmor 3 Thn 2017 Ttg Sistem Perbkuan
 - d) Kitab Udg-udg Hkm Perdata.
 - e) Yurisprudensi yg ada hbngnya dgn masalah plgg hk cp.
2. Bhn hkm sekunder, yaitu bhn-bhn hkm yg kaitannya dgn bhn hkm primer dn dpt membantu menganalisa dn memahami bhn hkm primier, terdiri dair bku-bku literatur, artikel, hasil plt, dn kary ilmiah lainnya yg sehbng dgn plt ini.
 3. Bhn non hkm yaitu bhn yg membrkan informasi dn penjelesan mengenai bhn hkm primer dn sekunder, yg berupa praktisi serta akademisi yg berkaitan dgn plt ini.

D. Teknik Pengumpulan Bhn Hkm

Teknik pengumpulan bhn hkm yg digunakan dlm plt hkm ini adh studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari landasan teoretis dair persalh plt dgn cara membaca bku dn mempelajari literatur yg berhbng dgn plt hkm ini, jga pnlsan ilmiah, pertran perudg-udgan dn sebagainya yg selanjutnya diolah dn dirumuskan scra sistematis.

Tujuan dair studi pustaka pd dasarnya adh menunjukkan jalan persalh plt. Pd plt hkm normatif, bhn pustaka merupakan data dasar yg dlm ilmu plt digolongkan sebagai data sekunder. Bhn hkm data sekunder mempunyai ruang lingkup sangat luas, melingkupi bku-bku sampai pd dokumen-dokumen resmi yg telh dikeluarkan oleh pemerintah. Bhn hkm memiliki kekuatan mengikat, sehingga plt yg dilakukan bukanlah aktivitas yg bersifat *trial and error*.

E. Analisis Bhn Hkm

Teknik Analisis Bhn Hkm adh pengolahan bhn hkm yg diperoleh baik dlm plt pustaka maupun lapangan. Teknik Analisi ini mggnkan Normatif, Bhn hkm sekunder yg didpt dair kepustakaan dipilih serta dihimpun scra sistematis, sehingga dpt dijadikan acuan dlm mlkkian analisis. Dair hasil bhn hkm plt pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan scra deskriptif analitis. Deskriptif adh pemaparan hasil plt dgn tujuan agar diperoleh suatu gambaran yg menyeluruh ttap sistematik terutama mengenai fakta yg berhbng dgn persalh yg akan diajukan dlm usulan plt ini. Hal ini mengkaji scra mendlm dair bhn hkm yg ada, kmd digabungkan dgn teori-teori yg mendukung dn ditarik kesimpulan. Bhn hkm primer dn bhn hkm sekunder dianalisis scra kualitatif untk membrkan solusi atau preskripsi thdap rumusan masalah atau menginterpretasikan bhn hkm kedlm bentuk kalimat yg tersusun scra sistematis sehingga diberikan penafsiran dn gambaran yg jelas sesuai dgn rumusan masalah untk kmd ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dlm pembahasan ini di jelaskan sebagaimana dgn rumusan masal dn metode penelitian menggunakan hkm normatif yg ada dlm bab seblmnya. Nmun pertama-tama sedikit mengulas berapa ttg hk cpt yg sebagai mana beberapa kali di jelaskan pd bab seblmnya bwa hk cpt adlh hk eksklusif pencpt yaitu Hk ekonom dn Hk mr. Hk ekonom adlh salah satu hk dmna pencpt dpt merasakan manfaat ekonomi atas cptannya. Hk mr adlh hk yg melekat pd diri pencpt yg tdk dpt dihilangkan dgn alasan apapun walaupun hk cpt tersebut telh dialihkan. Maka dpt di pahami mengenai pembahasan yg akan di bahas dlm;

Sejak awal pkmb tata hkm Indonesia yg bersumber dair hkm kolonial, demikian Soetandyo Wignjosoebroto⁷ mengungkapkan adlh pkmb yg sangat dipengaruhi oleh kbjkan-kbjkan liberalisme yg mencoba untk membukakan plg-plg lebar pd dn untk modal-modal wasta dair Eropa guna ditanamkan kedlm perusahaan-perusahaan besar di daerah jajahan (nmun jga dgn maksud di lain pihk ttap jga mlidugi kptg hk-hk masyarakat adat ataupun hk-hk pertanian tradisional masyarakat pribumi). Pldn itu⁸ diberikan dgn cara mengefektifkan berlakunya hkm untk rakyat pribumi, dgn member ruang berlakunya hkm adat. Formula yg digunakan adlh pemerintah Hindia Belanda membagi tiga golongan penduduk di wilayah Hindia Belanda ketika itu Penduduk di wilayah jajahan Hindia Belanda ketika itu dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan Eropa atau yg dipersamakan dgn Eropa
2. Golongan Timur Asing (Timur Asing Tionghoa dn Timur Asing lainnya seperti Arap dn India).
3. Golongan Bumi Putera (penduduk Indonesia asli).

Ada upaya pemerintah Hindia Belanda untk mensejajarkan berlakunya hkm di ngranya dgn hkm yg berlaku di daerah jajahannya. Kbjkan ini kemudian dikenal dgn penerapan azas konkordnsi. Meskipun kemudian kbjkan penerapan azas konkordnsi ini mendpt perlawanan dair ilmuwan hkm Bangsa Belanda sendiri seperti Van Vollenhoven dn Ter Haar.

Dpt dikatakan bwa dampak dair dinamika pilihan politik hkm Pemerintah Hindia Belanda tersebut sampai hari ini membuat hasil pluralisme hkm yg tdk berkesudahan. Ditambah laig pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia sendiri mlkkan pilihan politik hkm yg tersendiri pula untk memenuhi tuntutan tatanan hkm Indonesia pasca kemerdekaan. Tampaknya faktor politik tdk pernah lepas dair rangkaian kegiatan penyusunan tata hkm di Indonesia. Pengaruh-pengaruh tekanan politik asing (luar negeri) terus mempengaruhi kbjkan pembangunan hkm di Indonesia. Terutama pasca ratifikasi GATT/WTO 1994 sebagai instrument globalisasi ekonomi (nmun ttap membawa dampak pd sistem sosial lainnya) yg mengharuskan Indonesia menyesuaikan beberapa

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, Dair Hkm Kolonial ke Hkm Nasional Dinamika SosialPolitik Dlm Pkmb Hkm di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 3.

⁸ Melalui Psal 75 RR Lama dn kemudian diubah dgn 75 RR Baru yg sebelumnya jga telh dimuat dlm Psal 6-10 AB dn terakhir dgn Psal 131 dn 163 IS. Lihat lebih lanjut E. Utrecht dn Moh. Saleh Djindng, Pengantar Dlm Hkm Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 167.

pertran perudg-udgannya khususnya dlm lapangan Hk Kekayaan Intelektual dgn TRIPS Convention yg merupakan instrument hkm hasil Putaran GATT/WTO 1994.

Dlm penyusunan sistem hkm nasional harus mengacu pd azas-azas yg tercantum dlm garis politik yg dituangkan dlm Garis-garis Besar Haluan Ngra yg kala itu dittapkan dlm TAP MPR No. IV/MPR/1978 yg memuat sejumlah ass yaitu :

- a. Ass manfaat
- b. Ass usaha bersama dn kekeluargaan
- c. Ass demokrasi
- d. Ass adil dn merata
- e. Ass peri kehidupan dlm keseimbangan
- f. Ass kesadaran hkm
- g. Ass kepercayaan pd diri sendiri.

Ass-ass ini adlh merupakan pencerminan dair nilai-nilai kejiwaan Bangsa Indonesia yg tersirat dlm Pancasila yg dpt dijadikan sebagai dasar guna pembuatan tertib hkm Indonesia dn dpt pula dijadikan pedoman atau penunjuk arah guna menguji scra terbuka thd ap tiap produk perudg-udgan yg dilahirkan. Dair seminar itu jga dpt ditangkap bwa dlm penyusunan udg-udg, pembentuk udg-udg perlu dgn tepat dn cermat menunjuk nilai-nilai Pancasila sebagai yg mendasari kttan normatif yg termuat dlm udg-udg itu. Dgn demikian seluruh pertran hkm baik itu dlm bentuk undngundng maupun dlm bentuk pertran pelaksananya tdk boleh mengandung hal-hal yg bertgan dgn Pancasila.

Mengingat sifat penyiaran yg dinamis dn kreatif, maka di dlm tubuh organisasi penyiaran diperlukan lebih banyak manajer dn bukan pemimpin yg otoriter. Masalah yg timbul dlm pengelolaan penyiaran hanya dpt diselesaikan dgn tindak manajemen yg tepat dn benar. Tindak admi-nistratif tdk akan pernah menyelesaikan persalh yg timbul dlm penyiaran. Hal ini dikrnakan bidng penyiaran lebih menekankan kualitas output (siaran) dairpd kuantitas. Bdsk uraian di atas, maka kepd Radio Republik Indonesia harus segera diberikan status yg memungkinkan manajemen penyiaran dpt diterapkan scra profesional di dlm tubuh organisasi Radio Republik Indonesia.

Kasus-kasus pembajakan ini bila dibiarkan akan berdampak pd citra Indonesia dimata Internasional menjadi jelek, sehingga pencpt atau pnbit luar negeri akan enggan menerbitkan bkunya di Indonesia krna dikhawatirkan dibajak, dn scra otomatis tdk masuknya ilmu-ilmu, seni, sastra dn teknologi baru ke dlm negeri dair bku tersebut.

Setia Dharma Ali ketua IKAPI mengakui, plgg thd ap cpt yg kerap terjadi di Indonesia ini dpt membuat dgn enggan dlm berkreasi sehingga dpt membahayakan industri pnbitan.

kedudukan pnbit dlm pnbitan kary hk cpt?

Setelah Indonesia merdeka, kttan ttg *Auteurswet dn Reglement Industrieel Eigendom Kolonien* masih ttap diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga lahirnya Udg-udg Nmor 6 Thn

1982 ttg Hk cpt dn Udg-udg Nmor 19 Thn 1992 ttg Merek. Sdk Octoroi Wet dinyatakan tdk berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia krna dianggap tdk mengakui eksistensi kedaulatan ngra Republik Indonesia dlm menganugerahkan hk paten kepd penemu (inventor). Sejarah pembentukan hkm kekayaan intelektual berlangsung lebih intensif ketika Indonesia resmi menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pd thn 1994 dn scra otomatis Indonesia telh terikat pd kttn *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) Agreement yg berada di bawah Dewan Umum (General Council) WTO. Sejak saat itu pembangunan hkm kekayaan intelektual menjadi salah satu agenda politik hkm yg cukup penting di Indonesia dn menjadi titik awal penentu sejarah pembentukan hkm hk kekayaan intelektual dlm khazanah sistem hkm Indonesia sebagaimana yg kita kenal saat ini.⁹

Hk cpt sebagaimana telh dijelaskan pd bab seblmnya adlh salah satu bagian hk kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) . Hk cpt dibedakan dgn kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) lainnya. Menurut Simorangkir: hk merk, paten dn oktroi yg termasuk dlm *industrial property rights* , tdk tergolong dlm hk cpt.

Kategori hk cpt termasuk dlm satu kategori tersendiri dgn hk kekayaan perindustrian pd kategori lain bukanlah tdk beralasan. Dasar dair terbitnya hk kekayaan perindustrian adlh hk cpt. Dgn kata lain, hk cpt itu adlh induk dair hk kekayaan intelektual. Sebagai hk kebendaan immaterial dlm hk cpt, terkandung hk mr yg jga tdk berwujud yaitu hk untk ttap mencantumkan atau tdk mencantumkan naamnya pd salinan sehubungan dgn pemakaian cptan tersebut. Demikian jga hk untk mggnkan naam asli atau naam samaran.

Sekalipun hk cpt itu baru dpt diberikan pldn jika wujud nyata dair cptan itu dimunculkan nmun yg dilindungi bukanlah wujud nyatanya. Bukan bku, patung, dn lukisan, ttapi hk untk menerbitkan atau mempbnyak atau mngummkan bku, mempbnyak patung atau mereproduksi lukisan tersebut yg dilindungi sebagai hk cpt. Bku, patung, kain batik, kepingan VCD, program komputer yg terekam dlm kepingan CD Room , dilindungi sebagai hk atas benda berwujud, benda materil yg dlm terminologi Psal 499 KUH Perdata dirumuskan sebagai "barang" (benda berwujud). Dlm terminologi hk cpt, yg dilindungi adlh benda immaterial atau benda tdk berwujud atau dlm terminologi Psal 499 KUH Perdata adlh hk yg dpt menjadi obyek harta kekayaan yg merupakan hasil dair ide atau gagasan yg bersumber dair kecerdasan emosional dn kecerdasan intelektual manusia.

Pldn Cptan Bku yg tdk diketahui pencptnya menurut UUHC2014 disebutkan bwa dlm hal cptan tdk diketahui pencptnya dn cptan tersebut blm dilakukan pngumman, hk cpt atas cptan tersebut dipegang oleh Ngra untk kptg pencpt. Pd ayat (2) dinyatakan bwa dlm hal cptan telh dilakukan pngumman ttapi tdk diketahui pencptnya, atau hanya tertera naam aliasnya atau samaran pencptnya, hk cpt atas cptan tersebut dipegang oleh pihk yg mlkkan pngumman untk kptg pencpt

Hk cpt bila dipahami sepintas lalu adlh merupakan hk cpt mutlak dair si pencpt atau si pemegang hk. Nmun sifat kemutlakannya itu berkang setelh adnya pbtsan thdpt pemlikan hk cpt.

Dlm hal ini dpt kita cermati apa yg diungkapkan oleh Prof. Mahadi, yg menyatakan: " hk cpt, jika dibandingkan dgn hk mlik lainnya, kalah kuatnya dn kalah penuhnya. Hal ini krna hk cpt berlaku

⁹ H. OK,Saidin,op,cit., h.74.

hanya selama hidup si pencpt dn ditambah beberapa thn setelah meninggalnya si pencpt sesuai dgn kttan di masing-masing ngra."

Dasar pertimbangan lain adlh hasil suatu kary cpt pd suatu ketika harus dpt dinikmati oleh semua orang dn tdk hanya oleh orang yg mencptkannya dgn tdk ada pbtsannya. Dgn dittapkannya batasan tertentu di mana hk si pencpt itu berakhir maka orang lain dpt menikmati hk tersebut scra bebas, artinya ia boleh mngummkan atau mempbnyak tanpa harus minta izin kepd si pencpt atau si pemegang hk, dn ini tdk dianggap sebagai plgg hk cpt. Dgn berakhirnya jangka waktu pemlikan tersebut maka jadilah kary cpt itu sebagai mlk umum, suatu kuasa umum (publik domein) . Pbtsan jangka waktu hk cpt yg tercantum dlm UHC Indonesia bukanlah satu-satunya pertran hk cpt yg membrkan batasan. Dgn kata lain, di sam-ping UHC Indonesia pbtsan yg sama jga dikenal *dlm Auteurswet 1912, Konvensi Bern, Universal Copy Rights Convention* dn berbagai-bagai Konvensi dn Ksp Internasional lainnya.

Pnbit mempunyai hk atas kary yg anda tulis , beberapa hal pnbit dn hk cpt adlh dua hal yg berbeda. Hk cpt sendiri masi ada pd tangan sangdgn. Sdk hk pnbit ada pd penerima bku. Hk cpt sendiri sepenuhnya ada di dlm tangan dgn seumur hidup sampai dgn wafat. Sdk hk pnbit hanya berlaku sesaat.

Hk pnbit hanya berlaku bdsk kerja sama yg telh di sepakati oleh kedua belah pihk (dgn dn pnbit) sdk batas hk pnbit sampai batas kontrak kerja yg sudah di tentukan oleh beberapa hal misalnya sebagai kontrak bku diterbitkan selama 3 thn ,atau bku akan di cetak sekian eksemplar. Ketika kontrak sudah mencapai batas tersebut ,maka pjj itu habis,hk bebas kembali pd sang dgn.

Pnbit dn percetakan yg telh diberi kepercayaan dair seorang dgn untk mempbnyak mengedarkan serta menjual belikan kepd masyarakat umum, sudah kwjb untk turut serta membantu mlidugi hk cpt pgrang bku sehingga hk pgrang bku menjadi lebih terjamin dn terlindungi. Paranan pnbit dn percetakan akan lebih nyata laig bila dair pgrang bku diperhatikan sepenuhnya oleh pihk pnbit dn percetakan. Dgn demikian timbul saling percaya yg harmonis antara para pnbit dn percetakan bku untk saling bekerja satu dgn yg lain.

Persoalan Hk cpt selain menygkut kptg pemegang hk cpt itu sendiri, jga scra tdk langsung mempengaruhi para pnbit dn percetakan, krna para pnbitlah yg scra langsung terlibat dlm melestarikan cptan para pgrang . Dgn adnya bku yg beredar scra tdk sah yg dilakukan oleh pihk - pihk tertentu mempengaruhi para pgrang dn percetakan yg merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yg tdk sehat. Hal ini dpt menimbulkan kemacetan bagi pnbit dn percetakan krna bku-bku yg diedarkan itu tanpa izin dgn maupun pnbit dn kemudian di jual belikan kepd umum. Selain kerugian materiil yg scra nyata dialami oleh pnbit dn percetakan serta dgn, jga terdpt kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah -gairah serta kmmuan dgn untk mencptkan kary-kary yg bermutu tinggi.

Pjj Pnbitan Bku Menyepakati suatu pjj antara pgrang dn pnbit bku adlh proses pertama dlm suatu pnbitan bku. Pjj pnbitan bku tdk boleh bertgan dgn KUHPerdata, yakni adnya ksp antara pgrang dgn pnbit adnya keckap hkm dair pgrang ataupun pnbit, adnya objek tertentu, dn klausula yg halal ataupun suatu sebab yg tdk terlarang. Isi suatu pjj pnbitan bku harus jelas mengatur ttg pengalihan hk ekonom suatu cptan yg dilindungi hk cpt dair pgrang kepd pnbit bku yg akan mengeksplotasinya.

Tangung gugat pnbit dlm pendaftaran kary hk cpt thdap *First to announce*

hk cpt merupakan salah satu objek hk kekayaan intelektual yg paling rentan thdplg. Modus operandi plgg hk cpt jga semakin canggih dilakukan sejalan dgn canggihnya tingkat pkmb teknologi. Pd dasarnya, plgg hk cpt terjadi apabila materi hk cpt tersebut digunakan tanpa izin dn harus ada kesamaan antara dua kary yg ada. Si penuntut harus membuktikan bwa karynya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau kary lain tersebut berasal dair kary cptannnya. Hk cpt jga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dair cptan yg telh dilindungi hk cpt telh dikopi.

Kenyataannya, usaha pencegahan melalui perangkat perudg-udgan tersebut hingga kini tdk menunjukkan hasil yg signifikan dlm mengurangi intensitas plgg hk cpt ataupun mencegah makin meluasnya tindak pidna yg dilakukan oleh oknum-oknum yg tdk bertanggung jawab.

Tanggung gugat merupakan kwjb untk menggugat sebagai akibat melanggar norma. perbuatan yg menimbulkan melanggar norma tersebut dpt terjadi krnan di sebabkankarana oleh;

- a. unsur perbuatan melawan hkm;
- b. wansprestasi.

Bdsk makna tanggunggugat / *liability* di atas memiliki makna yg sempit dibandingkan dgn tanggung jawab / *responsibility*, krna tanggunggugat / *liability* hanya di gunakan dlm ranah hkm privat atau perdata.

Pengenalan HKI sebagai hk mlk perorangan yg tdk berwujud dn penjabarannya scra lugas dlm tatanan hkm positif terutama dlm kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dair sudut pandng HKI, aturan tersebut diperlukan krna adnya sikap penghargaan, penghormatan dn pldn tdk saja akan membrkan rasa aman, ttapi jga mewujudkan iklim yg kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untk menghasilkan kary-kary inovatif, inventif dn produktif. plgg hk cpt yg dpt dimintakan pertanggung jawaban hkm adlh pelaku yg scra langsung malakukan plgg hk cpt (*direct infringement*). Nmun demikian, dlm sejarah penegakan hkm hk cpt jga berlaku *secondary liability theory* yg mengenal adnya dua jns pertanggung jawaban hkm, yaitu *contributory liability* dn *vicarious liability* dair orang lain yg tdk mlkkan plgg hk cpt scra langsung, ttapi mereka scra yuridis dianggap telh mlkkan plgg hk cpt. *Contributory liability* memegang prinsip, apabila seseorang mengetahui adnya perbuatan plgg hk cpt, baik sebagai orang yg menganjurkan maupun mnyebabkn terjadinya plgg atau yg membantu scra materiil terjadinya plgg hk cpt dpt dikategorikan sebagai orang yg mlkkan plgg dn bertanggung jawab thdplg akibat yg ditimbulkan dair plgg tersebut.

Penggandaan bku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan thdplg software dn music. Plgg kary cpt bku dgn cara digandakan baik mggnkan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bwa dlm plgg suatu kary cpt lahir jika terdpt pihk-pihk lain tdk menjalankan apa yg telh menjadi Hk Eksklusif pencpt yg salah satunya adlh Hk ekonom. Selain itu, jga bisa dianggap plgg thdplg kary cpt bku jika pihk lain mggndakn bku scra besarbesaran tanpa penggunaan dn pbtsan yg wajar.

first to announce mengatur ttg mekanisme untk mngummkan pertama kali hasil kary sendiri dn scra otomatis sebagai pemlik cptannya. Di Indonesia, jangka waktu pldn hk cpt scra umumnya adlh sepanjang hidup pencptnya ditambah 50 thn atau 50 thn setelah pertamakali di umumkan atau di pubksi atau dibuat, kecuali 20 thn setelah pertama kali di siarkan untk kary siaran.

Beberapa hal yg terjadi dlm kalangan masyarakat kita adlh kurangnya pengetahuan ttg pendaftaran kary hk cpt seperti halnya A adlh seorang dgn bku dn dia berniatan berkerja sama atas pencetakan kary tulisnya ke B. B tdk menyadair atas kary tulis A telh di ambil oleh C dn di daftarkan oleh C ke dirjen HKI. Beberapa hari kemudian A menyadair ketika membaca beberapa bku yg baru beredar, bwa bku yg di baca adlh karya tulisnya. Pada akhirnya A melaporkan B atas tersebarnya bkunya, dn A juga mlkkan gugatan ke C atas tuduan mengambil karya tulisnya.

Ketdkpahaman thdap pentingnya hk ekonom pencpt menimbulkan kerugian bagi pencpt jika cptannya dgn mudah digandakan tanpa izin dair pencpt untk kptg komersil. Adnya Udg-udg Hk cpt (UUHC) membuat para pencpt lebih optimis thdap kary cptnya sendiri. Pkmb persalh hk cpt berjalan berdampingan dgn pkmb masyarakat baik dlm pkmb sosialnya maupun dlm pkmb teknologinya.

dlm Hk cpt pun ada pbtsan-pbtsan tertentu krna mempunyai fungsi dn sifat tertentu. Terbatasnya aturan yg menjelaskan ttg batasan-batasan seseorang diperbolehkan meng-copy dn myl menjadi akar timbulnya budaya *right to copy* semakin menjamur dair zaman ke zaman.

mengenai larangan dlm myl dn mggndakn bku tentu sudah ada semenjak Udg-udg Ttg Hk cpt muncul, hanya saja blm efektif krna blm jelasnya suatu aturan tersebut sehingga myl dn mggndakn menjadi membudaya di dlm negeri dn dpt dikatakan Bdy hk *Right To Copy*.¹⁰

Salah satu upaya pldn hkm bagi pencpt bku, pemerintah Indonesia turut dlm ksp internasional dgn menyesuaikan pertran dlm negeri dgn kttan internasional, yg dlm kerangka *General Agreement Trade and Tariff/ World Trade Organization (GATT/WTO)* adlh ksp *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)* sebagai salah satu dair *final act embodying the Uruguay round of multilateral trade negotiation*, yg ditandatangani di Marakesh pd bulan April 1994 oleh 124 ngra dn 1 wakil dair masyarakat ekonomi eropa. Bdsk hkm Internasional, persetujuan Internasional yg telh diratifikasi merupakan hkm nasional bagi Ngra itu sendiri.

menghendaki agar Indonesia turut meratifikasi keempat konfensi itu disamping GATT/WTO dn TRIPs yg telh diratifikasi. Sampai saat ini dair keempat konvensi itu Indonesia baru hanya meratifikasi dua konvensi dair empat konvensi yg diharuskan tersebut yaitu Paris Convention (1967) dn Bern Convention (1971).

berhubungan dgn Hk cpt adlh Udg-udg No 19 thn 2002 disebut UUHC 2002 ini diterbitkan untk mengganti Udg-udg No 12 thn 1997 yg dianggap blm terlalu memenuhi norma dn standar TRIPs.

Dlm UUHC 2002 bku jga menjadi objek yg mendpt pldn sebagaimana disebut dlm :

: Dlm Udg-udg ini cptan yg dilindungi adlh cptan dlm bidng ilmu pengetahuan, seni dn sastra, yg mencakup : huruf a. Bku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) kary tulis yg diterbitkan dn semua hasil kary tulisan lain.

Hasil ekspresi dair olah pikir dn kreatifitas seorang pencpt dibidng ilmu pengetahuan, seni dn sastra, oleh hkm Indonesia dilindungan dgn UUHC 2002. Hk cpt pd dasarnya berisikan hk ekslusif si pencpt/ pemegang hk cpt untk mengambil manfaat ekonomi sebuah cptan dgn melalui

¹⁰ H. OK,Saidin,op,cit., h.127.

berbagai cara, dilain pihk berisikan hk untk melarang pihk lain mggnkan cptannya (untk kptg komersil) tanpa ijin si pencpt/ pemegang hk cpt.¹¹

Dlm rumusan masah tersebut dpt di pahami bwa Yg dimaksud writing (kary tulis) adlh suatu cptan intelektual manusia yg dinyatakan dlm bahasa dgn mggnkan tanda-tanda tertentu sehingga mudah dibaca. Bentuk perwujudn dair writing dpt bermacam-macam jnsnya seperti berupa bku, surat kabar, majalah berkala dn pamphlet.

PENUTUP

Simpulan

Bdsk hasil dair plt dn pembahasan maka dpt simpulan sebagai berikut :

1. Bdsk hasil pembahasan, dlm hal pldng hk eknm pnpta bku thdap budaya hkm *rg to cpy* dpt ditarik kesimpulan bwa:
 - a. Bdsk Udg-udg Nmor ttg Hk cp Pngdaan plgg, krna hal tersebut melanggar hk-hk eknm pnpta dmna pngdaan bku dgn tujuan komersial dilakukan hanya untk kptg bisnis dn keuntungan semata. Bentuk pldng thdap pnpta bku dlm UUHC 28 Thn 2014 diatur dlm ttg pengaturan hk eknm pnpta, Psal ttg larangan pengelola tempat perdagangan untk mggndakn bku hasil plgg hk cp, serta ttg lembaga yg diberikan kuasa oleh pnpta bku untk mengelola dn mendistribusikan hk eknmnya.
 - b. Bentuk pldng hk eknm pnpta bku terkait pngdaan bku menurut *Kovensi Berne* adh Article 8 ttg *Right To Translation*, article 9 ttg *Right Of Reproduction*, Article 10 *Certain Free Uses Of Works*.
2. Bwa pelaksanaan pldng Hk cp scra otomatis bdsk prinsip deklaratif setelah suatu cptan diwujudkan dlm bentuk nyata tanpa mengurangi pbtsan sesuai dgn kttan pertran perudg-udgan. Bdsk Udg-udg ttg Hk cp, Pldng Hk cp atas Potret dpt dilakukan dgn dua cara, yaitu scra preventif yaitu mlkkan pndftrHk cp ke Direktorat Jenderal Hk kky itt, dn represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya plgg thdap Hk cp atas Potret.
3. Hbng hkm thdap pihk pnb dgn pnpta merupakan ikatan hk dn kwjb, dgn cara tersebut setiap pihk bertanggung jawab atas hk dn kwjbnya masing-masing, hbng hkm pihk pnb dgn pnpta scra umum diatur dlm pjj lisensi pnbitan bku.

Saran

1. Terkait kttan psal yg mengatur ttg pbtsan hk cp dlm Udg-udg Ttg Hk cp, sebaiknya lebih diperjelas laig dlm ketegori jumlah seseorang boleh myl dn mggndakn suatu kary cpt.
2. Dlm mencegah terjadinya plgg hk cp pd pnlsan yg lebih luas serta perlindungan bagi pnpta, sosial media menyarankan pencegahan yg lebih spesifik yaitu melalui pengawasan yg lebih komperhensif, serta pengaturan hkm hk cp yg mengakomodir seluruh hk pnpta yg ada dlm cptannya tersebut.

¹¹ Budi Santoso. Pengantar Hk Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister, Semarang, 2008, h. 84.

3. Dlm mencegah terjadinya plgg hk cp pd sosial media yg lebih luas serta perlindungan bagi pnpta, pnls menyarankan pencegahan yg lebih spesifik yaitu melalui pengawasan yg lebih komperhensif, serta pengaturan hkm hk cp yg mengakomodir seluruh hk pnpta yg ada dlm cptannya tersebut.
4. Pemerintah jga sebagai otoritas tertinggi yg bertugas mengayomi masyarakat seharusnya meningkatkan kualitas diri dgn menambah pengetahuannya ttg hk cp agar dpt membrkan pmhman yg baik kepd masyarakatnya.
5. Sosialisasi mengenai pencatatan daftar umum pjj lisensi hk cp oleh menteri melalui direktorat jendral kekayaan intelektual, sehingga para pihk dpt mendaftarkan pjj lisensi yg telh mereka buat dn mempunyai akibat hkm kepd pihk ketiga.